

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka Penulis menyimpulkan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat Laporan Kinerja tepat pada waktu yang sudah ditentukan dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, yaitu 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan DPMPTSP sudah menyapaikan Laporan Kinerja tahun 2020 pada tanggal 29 Januari 2021, yaitu satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Dari segi format, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Tahun 2020 masih belum sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014, hal ini disebabkan bahwa Laporan Kinerja yang dibuat masih mengacu pada Permen PAN RB No. 29 Tahun 2010 yang sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

3. Kinerja DPMPTSP tahun 2020 masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan alat ukur yang digunakan itu indeks kinerja utama (IKU) yang terdiri dari Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sebesar 86,36%, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 101,68%, Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online sebesar 100% dan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 96,19% dengan predikat sangat baik.

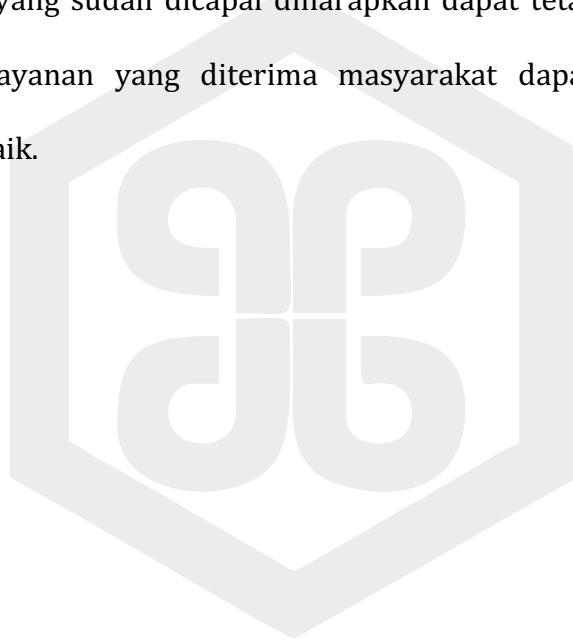
B. Saran

Walaupun DPMPTSP mencapai kinerja yang sangat baik pada tahun 2020, bukan berarti bahwa DPMPTSP sudah sempurna dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada beberapa saran dari penulis agar ke depan Laporan Kinerja DPMPTSP dapat lebih baik dari tahun 2020 antara lain :

1. Dalam menunjang pelayanan online yang diselenggarakan oleh DPMPTSP supaya meningkatkan penyediaan sarana internet, seperti jaringan yang tidak gampang terganggu. Memastikan vendor jaringan internet agar mempunyai komitmen dalam menyediakan jaringan yang kuat.
2. Untuk membuat laporan kinerja yang sesuai dengan format peraturan yang ada, diharapkan untuk selalu memahami perubahan-

perubahan aturan yang ada dan menyesuaikan segala bentuk laporan dengan peraturan yang masih berlaku.

3. Kinerja yang sudah dicapai diharapkan dapat tetap dipertahankan, agar pekayanan yang diterima masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohim Tauleka (2019). *Metodelogi Penelitian Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Surabaya. Airlangga University Press.
- BPKP (2011). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Bogor. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
- Dwi Lestari, Risha. 2019. *Analisis Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sietem Pelaporan, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik. : Study Empiris pada OPD di Kabupaten Temanggung*. Skripsi tidak diterbitkan. Kota Magelang. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harahap, Rudy (2013). *Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Konsep, Praktik, Studi Kasus dan Topik Lanjutan*. Jakarta. Pusat Informasi Pengawasan BPKP.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2006). *Model Penyelarasan Desain Pengukuran Kinerja individu dan Organisasi*. Jakarta. ©Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- LAN dan BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan berdemokrasi ke depan*. Jakarta, PT. Grasindo.
- Mangunsong, J. A. 2013. *Peranan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan. Program Studi Akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Mukarom, Zaenal dan Laksana, M. W (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Moleong, J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngatmo (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Semarang. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Putu Agung, Anak Agung (2012). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Malang. Universitas Brawijaya Press.

Putri Perwirasari, F.B. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Semarang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Rusdiana. A and Nasihudin (2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.

Salim and Syahrudin (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Citapusaka Media.

Sandu Siyoto and Ali Sodik, M (2015). *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta. Literasi Media Publishing.

Soleh, Chabib ang Suropto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintahan daerah. Model-model Penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Akhir Masa Jabatan, Akhir Tahun dan Laporan Pelaksanaan APBD*. Bandung. Fokusmedia.

Sundari, Sri (2019). *Manajemen Kinerja*. Bogor. Universitas Pertahanan.

Tarjo (2019). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta. Deepublish.

Vigih Hery Kristanto (2018). *Metodelogi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta. Deepublish.

Wahyu Ristina (2018). *Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Studi Kasus Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Makassar. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar.

Wulansuci, P. S. (2017). *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta. Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.*

_____, Nomor 14 Tahun 2017 tentang *Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*

Pereaturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

_____, Nomor 18 Tahun 2020 tentang *Penilaian Kinerja.*

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1x/6/8/2003 tentang *Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LAMPIRAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
2. Daftar Pertanyaan Penelitian
3. Lembar Persetujuan Penelitian Lapangan
4. Surat Penelitian Lapangan
5. Daftar Riwayat Hidup Penulis

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**